## KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 274 TAHUN 2009

#### **TENTANG**

# PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 38 TAHUN 2002 TENTANG IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

### MENTERI DALAM NEGERI,

### Menimbang

- a. bahwa Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 38 Tahun 2002 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 38 Tahun 2002 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair;

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727).

Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-

260/MK.7/2009 tanggal 10 Agustus 2009 perihal Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia atas Perda tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 38 Tahun 2002

tentang Ijin Pembuangan Limbah Cair, dengan alasan:

1. Retribusi izin dikenakan sekali untuk setiap penerbitan izin.

2. Izin pembuangan limbah cair berlaku sepanjang limbah cair yang dibuang tersebut masih dalam ambang batas daya tampung pencemaran dan daya dukung lingkungan, sesuai Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, sehingga

pendaftaran ulang izin tidak diperlukan.

KEDUA : Agar Walikota Jambi menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota

Jambi Nomor 38 Tahun 2002 tentang Ijin Pembuangan Limbah Cair, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11-12-2009 MENTERI DAI AM NEGERI

ttd

**GAMAWAN FAUZI** 

### Tembusan:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia:
- 4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
- 5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan);
- 6. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- 7. Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia;
- 8. Gubernur Jambi;

Ketua DPRD Kota Jambi.